

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Basrief, 2013, *Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Kumpulan Makalah Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2012 (Jilid I))*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Abubakar, Rifa'i, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2 Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2022, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Hiariej, Eddy O.S, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Maringka, Jan S., 2019, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

- Rahim, Muh. Ibnu Fajar, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, Guepedia, Bogor.
- Rustamaji, Muhammad, 2019, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah Pembaruan Tekstualitas Formulasi Nama dan Kandungan Nilainya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto R. M, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, Osman, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sugiharto, R., 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Tim MaPPI-FHUI, 2020, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Modul Penuntutan*, Kejaksaan R.I., Jakarta.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika cetakan ke empat, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Barda Nawawi Arief, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, 2012.
- Guntur, Muh., “Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Ke-2, 2020.
- Gaol, Jojon Desdwan Lumban, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jaksa”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 2, 2023.
- Idianto, Dimas, “Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Ilyas, Adam, “Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 16 No. 1, 2021

Lanongbuka, Billy, “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, 2020.

Maringka, Jan. S., “Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis”, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Volume 3, 2015.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-009/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/JA/8/1988 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

#### D. Hasil Penelitian

Alhumami, Khunaifi, 2020, Independensi Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Penegakan Hukum, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Satria Buana, Mirza, 2010, Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dengan Asas Keadilan (*Substansial Justice*) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hartono, Efriyadi 2019, Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Kepada Pelaku Tindak Pidana dan Faktor Yang Mempengaruhinya, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sutrisno, Anton, 2011, Kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum (Analisis terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan), *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sjafarinda, Juniar, 2011, Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan pada Terdakwa Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Purnomo, Agung, 2021, Pembaruan Tuntutan Pidana yang Berkeadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

#### E. Internet

Amirullah, "Jaksa Agung Akui Ada Disparitas Tuntutan Hukum Pihak Pro dan Kontra Pemerintah", <https://nasional.tempo.co/read/1472591/jaksa-agung-akui-ada-disparitas-tuntutan-hukum-pihak-pro-dan-kontra-pemerintah>, diunggah pada 14 Juni 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diunggah pada 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diunggah pada 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diunggah pada 1 Oktober 2022.

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id>, diunggah pada 26 Oktober 2016.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Implementasi Pedoman No. 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum di  
Kejaksaan Negeri Kota Kediri**

Fidar Asifa Putra, Niken Subekti Budi Utami, SH, M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengertian Kejaksaan”,  
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksanaan>, diunggah pada 1  
Maret 2022.

Sudirja, Rudi Pradisetia, “Satu Komando Penuntutan untuk Sipil dan Militer”,  
<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877>, diunggah pada 6 Juli  
2020.